



# R-LPPD 2023



**RINGKASAN  
LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN  
PROPINSI  
SULAWESI UTARA**



**BUPATI**

**FRANKY DONNY WONGKAR, SH**



**WAKIL BUPATI**

**Pdt. PETRA YANI REMBANG**

## R-LPPD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

### A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,66	72,89	1,06
2	Angka Kemiskinan	8,89	9,00	-1,22
3	Angka Pengangguran	4,98	5,77	-13,69
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,54	5,41	2,40
5	Pendapatan Per kapita	48,08	43,56	10,38
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,350	0,382	-8,38

Sumber : Buku Minsel Dalam Angka 2023.- Bapelitbang Minahasa Selatan.

### B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97.00	
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.44	
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96.90	
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	80.00	
2	KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.15	
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.62	
		1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.16	
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00	
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00	
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100.00	
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00	
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.00	
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99.10	
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87.90	
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	
3	PEKERJAAN UMUM	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten	#DIV/0!	tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan Propinsi
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	#DIV/0!	tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan infrastruktur pantai dan penanganan infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan Propinsi
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	8.19	
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	74.92	
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.94	
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100.00	
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	55.40	
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	untuk jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan oprator dan teknis analis

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					tidak dapat kami sajikan dikarenakan tenaga kerja konstruksi belum menyampaikan bukti sertifikat pelatihan
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100.00	
4	PERUMAHAN RAKYAT	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100.00	
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100.00	
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	21.57	
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	23.62	
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.23	
5	TRANTIB DAN LINMAS	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00	
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100.00	
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	126.00	
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.45	
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
6	SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	68.20	
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100.00	
7	TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	#DIV/0!	Belum ada Rencana Tenaga Kerja daerah
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100.00	
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	387.11	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40.00	
		2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah kabupaten	22.75	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.74	
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.06	
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.01	
9	PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100.00	
10	PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	#VALUE!	Tidak dapat disajikan dengan alasan tidak ada data
		2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	#DIV/0!	tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak tersedianya data peteapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
		2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	#VALUE!	tidak tersedia karena tidak ada
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	#DIV/0!	tidak dapat kami sajikan dengan alasan tanah objek landrefrom yang di redistribusikan pada tahun 2022 berasal pada tahun 2022 bersala dari pelepasan kawasan hutan, bekas hak guna usaha dan tanah negara lainnya dengan total 754 bidang tanah
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	#DIV/0!	tidak dapat di sajikan dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					alasan tidak ada layanan pertanahan yang memiliki output dokumen izin membuat tanah
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	#DIV/0!	tidak dapat di sajikan dengan alasan tidak ada pengaduan tentang sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi
11	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	68.86	
		2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten	32.23	
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	-	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	79.24	
		2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	33.86	
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	87.13	
		2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	15.15	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.l.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	#DIV/0!	Tidak dapat disajikan dengan alasan sesuai dengan indeks desa membangun tahun 2023 untuk kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak terdapat lagi desa tertinggal
		2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	64.96	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	xee	tidak dapat di sajikan dengan alasan brlum tersedianya data kelahiran penduduk penduduk perkelompok

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					umur, belum adanya data kependudukan dari instansi terkait serta perhitungan TFR di dasarkan pada data kelahiran tiap 5 tahun sekali
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	42.16	
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.25	
15	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten	51.60	
		2.n.2	V/C Ratio di Jalan kabupaten		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	57.58	
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	
		2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten	77.72	
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100.00	
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0.09	
18	PENANAMAN MODAL	2.q.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	185.74	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4.30	
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12.09	
		2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga		
20	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	
		2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00	
21	PERSANDIAN	2.t.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	#DIV/0!	Tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak ada kegiatan strategis melalui

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					pengamanan sinyal pada tahun 2022 pada bidang persandian karena tidak ada program kegiatan dan kurangnya SDM.
22	KEBUDAYAAN	2.u.1	Terlestarikannya Cagar Budaya		
23	PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		tidak ada karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut
24	KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	16.25	
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	35.67	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP)	81.39	
26	PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	#DIV/0!	
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	15.70	
		3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	6,353.85	
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0.35	
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.24	
27	PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	19.74	
		3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	397.22	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.e.1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	#DIV/0!	Dengan ini menyatakan bahwa Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					daerah kabupaten di kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 adalah sebanyak 0.
30	PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100.00	
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	7.47	
		3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2.51	
31	PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	98.5185185 2	
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Provinsi Sulawesi Utara belum ada penetapan RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) dan Kabupaten Minahasa Selatan saat ini belum ada penetapan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) berdasarkan indikator pembangunan industri dalam RIPIN.
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	19.53	
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	#DIV/0!	Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dan Jumlah izin yang dikeluarkan di Kabupaten

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					Minahasa Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan Industri Menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten	#DIV/0!	Tidak dapat kami sajikan dengan alasan jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Dinas Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					tidak memiliki data tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Hasil EPPD tahun 2022 atas Laporan LPPD Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat nilai 2,46 dengan status Rendah. Kemudian untuk Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 mendapatkan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

#### D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

##### PENDAPATAN

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.015.342.877.869,00</b>	<b>937.983.714.525,56</b>	<b>77.359.163.343</b>	<b>92,38%</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>38.665.554.506,00</b>	<b>22.867.383.937,56</b>	<b>15.798.170.568</b>	<b>59,14%</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	21.778.943.348,00	12.896.289.107,50	8.882.654.241	59,21%
	Hasil Retribusi Daerah	5.722.525.930,00	4.819.713.972,00	902.811.958	84,22%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.551.851.596,00	1.351.851.596,00	200.000.000	87,11%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.612.233.632,00	3.799.529.262,06	5.812.704.370	39,53%
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>743.714.454.280,00</b>	<b>697.866.040.056,00</b>	<b>45.848.414.224</b>	<b>93,84%</b>
	Dana Bagi hasil	19.491.415.748,00	16.507.939.911,00	2.983.475.837	84,69%
	Dana Alokasi Umum	520.301.357.000,00	524.240.004.316,00	-3.938.647.316	100,76%
	Dana Alokasi Khusus(fisik)	73.812.302.532,00	71.602.745.422,00	2.209.557.110	97,01%
	Dana Alokasi Khusus(NonFisik)	130.109.379.000,00	85.515.350.407,00	44.594.028.593	65,73%
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>31.168.867.528,00</b>	<b>27.427.221.274,00</b>	<b>3.741.646.254</b>	<b>88,00%</b>
	Pendapatan Hibah	20.859.638.000,00	18.517.439.072,00	2.342.198.928	88,77%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.309.229.528,00	8.909.782.202,00	1.399.447.326	86,43%

## PENGELUARAN

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	%
1	<b>BELANJA</b>	<b>1.028.458.786.349,00</b>	<b>934.378.037.654,86</b>	<b>94.080.748.694,14</b>	<b>90,85%</b>
	<b>BELANJA OPRERASI</b>	<b>708.606.939.146,00</b>	<b>632.520.704.005,86</b>	<b>76.086.235.140,14</b>	<b>89,26%</b>
	Belanja Pegawai	406.221.080.634,00	380.423.482.293,00	25.797.598.341,00	93,65%
	Belanja Barang dan Jasa	278.180.983.888,00	242.999.697.088,86	35.181.286.799,14	87,35%
	Belanja Hibah	22.204.874.624,00	7.097.524.624,00	15.107.350.000,00	31,96%
	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>114.931.198.592,00</b>	<b>98.376.691.797,00</b>	<b>16.554.506.795,00</b>	<b>85,60%</b>
	Belanja Modal Tanah	390.000.000,00	253.044.000,00	136.956.000,00	64,88%
	Belanja Modal Peralatan Mesin	28.586.614.872,00	23.247.987.774,00	5.338.627.098,00	81,32%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.906.694.864,00	48.171.959.584,00	3.734.735.280,00	92,80%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.193.567.728,00	26.019.738.648,00	6.173.829.080,00	80,82%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.854.321.128,00	683.961.791,00	1.170.359.337,00	36,88%
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.182.454.910,00	15.428.408.480,00	-5.245.953.570,00	151,52%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.182.454.910,00	15.428.408.480,00	-5.245.953.570,00	151,52%
4	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.812.500.000,00</b>	<b>2.312.500.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>48,05%</b>
	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	0	2.500.000.000,00	0,00%
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.312.500.000,00	2.312.500.000,00	0,00	100,00%
5	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.369.954.910,00</b>	<b>13.115.908.480,00</b>	<b>-7.745.953.570,00</b>	<b>244,25%</b>

### E. INOVASI DAERAH

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			
1.	Pembentukan Bunda PAUD di tiap desa di Kabupaten Minahasa Selatan	Terbentuknya PAUD di tiap Desa dan dilakukan kegiatan-kegiatan Inovasi lainnya	Penghargaan Bunda PAUD Inspirasi kepada Bunda PAUD Minahasa Selatan Ibu Elsje Rosje Sumual oleh Kemdikbudristek
2.	Perpustakaan Digital	Sekolah-sekolah melaksanakan Perpustakaan Digital	Penghargaan Kabupaten Pelaksana Perpustakaan Digital oleh Kemdikbudristek RI

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
3.	Pembentukan TIM Transformasi Pendidikan	Terbentuk TIM Reformasi Pendidikan lewat SK Bupati Minahasa Selatan	Penghargaan Kabupaten Pertama di Indonesia yang melaksanakan Transformasi Pendidikan oleh Kemdikbudristek RI
4.	Bimtek Operator dalam percepatan aktifasi akun belajar.id	Teraktifasi akun guru dan akus siswa dalam Platform Merdeka Belajar	Penghargaan Peringkat 12 Kabupaten/kota Se Indonesia dalam aktifasi akun guru dan siswa
<b>DINAS KESEHATAN</b>			
1.	TEMUSOBAT (Temukan Periksa Obati) Malaria Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surevei Migrasi</li> <li>• Pemeriksaan Laboratorium</li> <li>• Pengobatan yang tepat</li> <li>• Evaluasi Pengobatan</li> <li>• Penyelidikan Kasus</li> </ul>	Eliminasi Malaria di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyakit malaria menurun terkendali dalam indikator :  1. Tidak ada penularan setempat  2. API = Kasus &lt; 1 per 100.000 penduduk  3. SPR = Pemeriksaan laboratorium &lt; 5 per suspek diperiksa</li> </ul>	Sertifikat Eliminasi Malaria Kab. Minahasa Selatan oleh Menteri Kesehatan RI
2.	Ikut serta dalam penilaian Kabupaten Sehat dengan penilaian program dilihat dari capaian selama 2 tahun terakhir	Capaian program lintas sektor lebih baik dari 3 tahun sebelumnya	Penghargaan Swastisaba Padapa Kabupaten Sehat
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>			
1.	Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT	Bendahara Instansi Pemerintah terbaik kedua	sertifikat nomor: 6/ser/kp.1607/2023 tanggal 27 januari 2023
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			
1.	Layanan PUSDALOPS	1. Update data cuaca setiap saat. 2. Tersedianya informasi sebelum terjadinya/peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi. 3. Informasi bencana alam.	
<b>SATPOL PP</b>			
1	Pembuatan Aplikasi SIAGA KANAN Satlinmas	Dengan adanya APLIKASI SIAGA KANAN Satlinmas Masalah Penegakan Peraturan daerah dan Penegakan Kententraman dan ketertiban umum didesa/kelurahan segera cepat diselesaikan	Tidak Ada

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DINAS SOSIAL			
1	<b>SETARA</b> (Segera Tanggap Respon dan Aduan)	Terpenuhinya Pelayanan Respon dan Aduan	Mendapatkan nilai terbaik dari OMBUDSMAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
1	Pembinaan kepada Perusahaan-perusahaan	Terlaksananya k3 dengan baik pada perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil	· Piagam Penghargaan k3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kepada Bupati Minahasa Selatan sebagai Pembina
PPPA			
1	Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak	100%	Predikat Pratama Kabupaten/Kota Layak Anak
DINAS KETAHANAN PANGAN			
1	Gelar Pangan Murah	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
1	JEMPOL HEBAT	- Terwujudnya pelayanan yang cepat tepat dan akurat langsung jemput bola ke desa-desa.	- Juara I Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan.
2	5 in 1	- Sekali mengurus perkawinan 5 Dokumen diberikan.	
PPKB			
1	Pelayanan KB Seribu Akseptor	Terlaksananya pelayanan KB MKJP bagi pasangan usia subur di 17 Kecamatan	Juara II pelayanan KB MKJP tingkat Provinsi Sulawesi Utara
2	Lomba Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi	Meningkatnya peran serta dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, kelompok kerja dan mitra kerja untuk pengembangan dan peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	Desa Tangkuneu Juara I dan Desa Wiau Lapi Juara III Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
DINAS PERHUBUNGAN			
1	PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN <b>E-BLUE</b> (BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK)	SISTEM LAYANAN APLIKASI YANG TERINTEGRASI DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI ( <a href="http://ngekironline.co.id">HTTP://NGEKIRONLINE.CO.ID</a> ), SERTA MENGAKOMODIR PEMBAYARAN NON-TUNAI (KODE BILLING)	E – BLUE Sudah Terintegrasi dengan Website Resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
2	Tersedianya aplikasi data angkutan kendaraan umum dalam bentuk aplikasi web 'sistem informasi angkutan (sim) '	Aplikasi sistem informasi angkutan ( <i>dishubminsel.my.id</i> )	-
3	Peningkatan capaian pendapatan asli daerah (pad) di bidang pelayaran dan asdp melalui jasa layanan kepelabuhanan	Capaian pad sebesar 240 %	-
4	Tersedianya website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan	Website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan ( <a href="https://dishub.minselkab.go.id">https://dishub.minselkab.go.id</a> )	-
<b>DINAS KOMINFO</b>			
1	Melaksanakan Penerapan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan		
<b>DINAS KOPERASI DAN UKM</b>			
1	Pelaksanaan bazar Natal umkm	Mempromosikan produk-produk olahan yang ada di minahasa selatan khususnya pelaku umkm	Sertifikat/ piagam untuk pelaku umkm
<b>DPMPTSP</b>			
1	IZIN KELILING	Melakukan Izin Keliling Di 4 (Empat Kecamatan) : Amurang Barat Tumpaan Tareran Suluun Tareran	
<b>BAPELITBANGDA</b>			
1	Kantin Pejuang Lingkungan	Sebagai Daerah Inovatif	-
<b>DINAS PERIKANAN</b>			
1	" KUSUKA Pintar" Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Hasil Perikanan, Pedagang/Tibo2) yang mampu menggunakan kemajuan teknologi digital berbasis android dengan berbagai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan Aplikasi SATU DATA dan PILAR KKP Nelayan dan pembudidaya ikan terdaftar dalam database dan menerima Kartu KUSUKA dari BANK BNI</li> <li>Melalui Aplikasi LAUT NUSANTARA, nelayan dapat mengetahui posisi serta merencanakan penangkapan ikan.</li> </ul>	Bertambahnya alokasi bantuan pemerintah dikarenakan banyaknya data nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar ikan dalam database KUSUKA.

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
	aplikasi sektor perikanan		
<b>DINAS PERTANIAN</b>			
1	Lanjutkan gerakan "mari jo ba tanam"	Terlaksananya "gerakan marijo batanam" di tahun 2022 yang memberikan stimulasi bagi masyarakat minahasa selatan untuk mengoptimalkan lahan yang ada baik lahan pertanian/perkebunan maupun pekarangan rumah atau instansi, sehingga mendorong sektor pertanian menjadi penggerak pemulihan ekonomi, sehingga program ini dilanjutkan pelaksanaannya	Penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan inflasi
<b>DINAS PERDAGANGAN</b>			
1	Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	35 Sertifikat TKDN untuk e-katalog pengadaan barang dan jasa	Sertifikat TKDN
<b>INSPEKTORAT</b>			
1	Pengurusan Bebas Temuan Online	Desa Wiau Lapi Kec. Tareran memperoleh nilai 91,5 Kategori Istimewa dalam Penilaian Program Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 oleh KPK-RI.	Desa Wiau Lapi masuk dalam Kategori Istimewa dalam Penilaian Program Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 oleh KPK-RI di IKN.
2	Desa Anti Korupsi		
<b>BKPSDM</b>			
1	Penggunaan Aplikasi SIASN dan SSCASN dalam rangka pemanfaatan data Sistem Informasi dan CAT	1. Terintegrasinya data ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. 2. Meningkatnya akurasi data ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan karena dimutakhirkan secara berkala. 3. Terlaksananya Seleksi ASN dengan metode CAT	BKN Awards 2023 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
2	Penggunaan Aplikasi e-Formasi, SIM PG-P3K dan Renbut Nakes	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan ASN. 2. Jumlah kebutuhan rencana pengadaan ASN yang diinput pada aplikasi e-Formasi, SIM PG-P3K dan Renbut Nakes sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan.	BKN Awards 2023 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
1	PENGELOLAAN KEUANGAN	Pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai 3 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ol> Untuk melaksanakan program-program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mendapat pagu setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 246.993.844.357 Dengan Realisasi Anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 237.205.021.368 atau 96.04% dari pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Tahun 2022 mendapat Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	Pembayaran Online Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan NOP	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai NOP	Piagam Penghargaan Lunas PBB-P2
2	Pembayaran Pajak secara Online melalui Aplikasi SIGAP	Tercapainya Pembayaran Pajak secara Online	Piagam Penghargaan Taat Pajak
<b>SEKERETARIAT DAERAH</b>			
1	Dalam Penggunaan Katalog Elektronik Lokal	UKPBJ Kab. Minahasa Selatan mewajibkan semua OPD yang melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa harus melalui proses Katalog Elektronik Lokal	Tidak ada
2	Konsultasi Hukum Online dan Offline	60%	-

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
3	Pemberian Reward and Punishment pada Perangkat Daerah yang memasukkan Laporan EPRA tepat waktu.	Tingkat kepatuhan memasukkan laporan meningkat.	
4	Sistem Evaluasi dan Monitoring dibidang perekonomian secara Virtual.	Terlaksananya evaluasi dan monitoring dibidang perekonomian.	Prioritas dalam penyusunan dokumen usulan maupun perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
5	MOU Bagian Sumber Daya Alam dengan PT. Cargill Minahasa Selatan	Adanya Pengembangan Kebun Benih Kelapa Bido	

Amurang, 20 Maret 2024

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**FRANKY DONNY WONGKAR, SH**